

Terminal Baranangsiang Ditutup Selama Larangan Mudik

BOGOR (IM)- Terminal Baranangsiang, Kota Bogor akan menghentikan operasional pelayanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Penghentian operasional tersebut dilakukan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri.

Kepala Terminal Kelas IA Baranangsiang, Moses Lieba Ary mengatakan, berdasarkan Permenhub Nomor 13 Tahun 2021, larangan operasional bus AKAP dan AKDP dari Terminal Baranangsiang akan mulai diberlakukan pada 6 Mei hingga 17 Mei mendatang.

Oleh karena itu, untuk menjalankan peraturan tersebut saat ini pihak Terminal Baranangsiang tengah melakukan sosialisasi kepada seluruh PO bus di terminal. Baik PO bus AKAP maupun AKDP.

Nantinya, masing-masing

PO akan diminta untuk menarik armadanya melalui surat dari direktur angkutan. "Akan ada surat dari direktur angkutan kepada masing-masing PO untuk menarik armadanya (AKAP dan AKDP)," ujar Moses, kemarin.

Sementara itu, lanjutnya, jumlah PO bus AKAP yang ada di Terminal Baranangsiang saat ini sebanyak 14 PO. Sedangkan untuk bus AKDP berjumlah 12 PO.

Berdasarkan data terakhir, sambung Moses, setiap harinya ada 22 armada bus AKAP yang berangkat dari Terminal Baranangsiang, dengan membawa penumpang sebanyak 182 orang. Sementara itu, untuk bus AKDP yang berangkat sebanyak 27 armada dengan membawa 200 orang.

Moses menambahkan, khusus armada bus yang melayani wilayah aglomerasi yaitu Jabodetabek masih diperbolehkan beroperasi. "Untuk wilayah aglomerasi masih diperbolehkan beroperasi," pungkasnya. ● **gio**

Biar Aman, Kab. Bogor Tambah Titik Penyekat Arus Mudik

CIBINONG (IM)- Polres Bogor, Kodim 0621 dan Pemkab Bogor menambah satu titik penyekatan pada saat musim libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah yaitu mulai (6-17/4) mendatang. "Kami menambah titik penyekatan dari awalnya tujuh menjadi delapan titik. Delapan titik tersebut berada di wilayah perbatasan ialah Cariu, Cigombong, Cisarua, Parung, Cileungsi, Jasinga dan Cibinong dan Megaluh," ucap Kapolres Bogor, AKBP Harun kepada wartawan, Selasa (27/4).

Alumni Akpol Tahun 2001 ini menambahkan selain di titik perbatasan, jajarannya juga memonitor pergerakan masyarakat atau menyekat di empat stasiun kereta yang masuk wilayah hukum Polres Bogor. "Kami juga akan menyekat masyarakat luar Kabupaten Bogor di Stasiun Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Stasiun Cibinong Stasiun Tenjo dan Stasiun Parungpanjang," tambahnya.

Bagi masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang

ingin mudik atau berwisata ke Kabupaten Bogor. Ia meminta membawa sertifikat vaksinasi Covid 19 atau hasil non reaktif rapid test antigen.

"Pemudik atau wisatawan luar Jabodetabek akan kami putar balik. Kalau yang warga Jabodetabek kami minta tunjukkan sertifikat vaksinasi Covid 19 atau hasil non reaktif rapid test antigen jika ingin masuk ke wilayah Kabupaten Bogor. Hal itu kami lakukan demi memperkecil potensi penyebaran wabah Covid 19," pinta AKBP Harun.

Mantan Kapolres Lamongan ini menjelaskan dalam penyekatan, mobil berplat nomor polisi non F lebih diprioritaskan untuk diperiksa baik tujuan, hasil rapid test antigen ataupun sertifikat vaksin Covid 19. "Untungnya selama waktu libur Hari Raya Idul Fitri bus antar kota dilarang beroperasi hingga kami akan fokus dalam menyalurkan kendaraan pribadi yang berplat nomor polisi non F untuk diperiksa tujuan pemudik, keberadaan hasil rapid test antigen dan sertifikat vaksin Covid 19," jelasnya. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

VIRTUAL TOUR KAWASAN BOROBUDUR

Seorang warga mengikuti program Virtual Tour Kawasan Borobudur pada acara peringatan Hari Warisan Dunia di kota Temanggung, Jateng, Selasa (27/4). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Program Creative Youth at Indonesian Heritage Sites dari UNESCO Jakarta bekerja sama dengan Balai Konservasi Borobudur (BKB) tersebut bertujuan mengajak peserta menjelajahi dan menelusuri kekayaan dan keindahan desa-desa di kawasan Borobudur yang belum banyak diungkap diantaranya kerajinan, kuliner, cagar budaya dan kesenian.

Wapres Minta Pemkab Bogor Tingkatkan Pelayanan Publik

Saya meminta seluruh jajaran Pemda sebagai ujung tombak pemerintahan, agar selalu menjadi contoh dan pelopor dalam berinovasi meningkatkan kualitas pelayanan publik, maupun dalam menegakkan protokol kesehatan, serta menyukseskan program vaksinasi di seluruh Indonesia," tegas Wapres Ma'rif Amin.

BOGOR (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapatkan pesan dari Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma'rif Amin untuk berinovasi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut dikatakan Wa-

pres secara virtual di hadapan Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan jajaran pemerintah daerah pada puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXV di Ruang Rapat 1 Sekretariat Daerah, Cibinong,

Kabupaten Bogor, kemarin.

"Saya meminta seluruh jajaran Pemda sebagai ujung tombak pemerintahan, agar selalu menjadi contoh dan pelopor dalam berinovasi meningkatkan kualitas pelayanan publik, maupun dalam menegakkan protokol kesehatan, serta menyukseskan program vaksinasi di seluruh Indonesia," tegas Wapres Ma'rif Amin yang juga Ketua MUI Pusat Jakarta.

Ma'rif Amien menjelaskan, pelaksanaan otda yang berkualitas membutuhkan kepemimpinan adaptif, pemimpin yang mampu menghadapi berbagai situasi, cepat dan tepat dalam bertindak dan berorientasi terhadap pemecahan masalah dengan selalu menyesuaikan dirinya dengan

perubahan dan keadaan baru.

"Selamat Hari Otonomi Daerah, bangun semangat kerja dan tingkatkan gotong royong di masa pandemi Covid-19 untuk masyarakat sehat, ekonomi daerah bangkit dan inovasi maju," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian mengingatkan, Peringatan Hari Otonomi Daerah bukan hanya peringatan seremonial yang diselenggarakan secara rutin, namun memiliki makna yang sangat dalam.

"Peringatan Hari Otonomi Daerah XXV Tahun 2021, dengan tema "Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19, untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi

Daerah Bangkit, dan Indonesia Maju," menjadi momentum kepala daerah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19," papar Tito.

Lebih lanjut Tito menuturkan, kepala daerah diuji kehebatannya dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan merumuskan kebijakan solusi yang berdampak positif bagi masyarakat. Hal ini penting karena pandemi memberikan dampak multidimensi terhadap pembangunan di daerah.

"Kita melihat momentum Peringatan Hari Otda ke-25 ini, adalah challenge bagi semua kepala daerah, ketika mereka berhasil keluar dari dampak sosial dan dampak ekonomi pandemi Covid, di situlah kepala daerah yang hebat," ujar Mendagri, Tito Karnavian. ● **gio**



IDN/ANTARA

TUMPAHAN MINYAK MENTAH KEMBALI CEMARI LAUT KARAWANG

Warga mengumpulkan tumpahan minyak mentah milik Pertamina yang tercecer kembali di pesisir Pantai Cemarajaya, Cibuyaya, Karawang, Jawa Barat, Selasa (27/4). Tumpahan minyak mentah yang termasuk dalam golongan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) itu kembali mencemari pantai akibat kebocoran pipa di sekitar area BZZA atau 15 mil dari pesisir pantai yang berdampak pada nelayan dan merusak ekosistem laut.

Disnaker Bandung Buka Posko Pengaduan THR

BANDUNG (IM)- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung mempersilakan karyawan untuk melaporkan terkait permasalahan tunjangan hari raya (THR) ke posko pengaduan THR di Jalan Martanegara nomor 4 yang sudah dibuka. Perusahaan wajib membayar THR pada H-7 hari raya Idul Fitri 1442 hijriah.

"Saya harapkan tahun ini bisa terbayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja minimal h-7. Dinas tenaga kerja sudah membuka posko pengaduan THR di Jalan Martanegara nomor 4," ujar Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Syaefudin di Taman Sejahtera, Selasa (27/4).

Dia menuturkan, apabila perselisihan terkait THR sudah diselesaikan antara perusahaan dengan pekerja maka harus dilaporkan kepada dinas. Pembayaran THR yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dengan aturan yang ada.

Arief mengatakan, hingga saat ini, belum ada perusahaan yang menyatakan tidak sanggup membayar THR di masa pandemi Covid-19. Pihaknya juga belum menerima permohonan

pengajuan THR dengan cara dicicil kepada para pekerja.

Meski perusahaan mengajukan permohonan mencicil THR, tapi tetap harus dibayarkan seluruhnya hingga batas waktu h-7. Apabila terjadi pelanggaran maka pihaknya akan berkoordinasi dengan pengawasan tenaga kerja di tingkat provinsi Jawa Barat.

Dia mengatakan, bagi karyawan kontrak maupun outsourcing maka perusahaan tetap harus membayar THR mengacu kepada aturan dan ketentuan yang ada. "Itu wajib dibayarkan sesuai regulasi yang sudah ada," katanya.

Arief mengatakan, jumlah tenaga kerja di Kota Bandung yang terdata oleh dinas mencapai 1.167.890 orang. Disamping itu, perselisihan perusahaan dengan karyawan menyangkut pesangon, PHK dan lainnya pada tahun 2020 masih berlangsung hingga saat ini.

"Kebetulan tahun lalu banyak 147 kasus dan sekarang masih berdatangan lagi, juga satu hari menyelesaikan tiga perselisihan. Rata-rata kaitan dengan pesangon, PHK dan lainnya," katanya. ● **gio**

Ada Sebanyak 724.546 Lansia yang Terlantar di Jabar

BANDUNG (IM)- Pemprov Jabar memberikan perhatian pada kalangan lanjut usia (Lansia). Pasalnya, hingga saat ini, masih ada lansia yang terlantar.

Diperkirakan, jumlah lansia di Jawa Barat yang terlantar hingga 2020 berdasarkan asumsi Kementerian Sosial mencapai 724.546 jiwa lansia atau 15 persen dari 4,8 juta Lansia.

Menurut Kepala Dinas, Dodo Suhendar, dari jumlah lansia yang terlantar itu, baru 31,53 persen yang terlayani atau 228.514 jiwa Lansia mendapatkan pelayanan panti milik pemerintah, swasta dan juga mendapatkan program keluarga harapan (PKH).

"Penanganan Lansia di Jabar masih perlu ditingkatkan agar jumlah lansia yang terlantar bisa ditekan atau dikurangi," ujar Dodo dalam pembukaan Webinar Nasional Atensi Lansia Bahagia dan Sejahtera dalam Kesetaraan, Selasa (27/4).

Dodo mengatakan, tugas tersebut bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab generasi muda dan juga berbagai pihak. Apalagi, ke depan jumlah Lansia kedepan akan terus bertambah.

"Jumlah Lansia di Jabar menurut BPS tahun 2020 mencapai 10,2 persen. Bahkan di 2035 estimasinya jadi 16 persen," katanya.

Untuk diketahui, kata dia, dinamika lansia itu kurang gerak, mudah jenuh, gangguan kesehatan, gangguan intelektual/ dimensi, gangguan nutrisi, gangguan pendengaran penglihatan, tidak memiliki penghasilan, menderita penyakit dan mengisolasi diri.

"Untuk itu kami kerja sama dengan Lembaga Lansia Indonesia (LLI Jabar) dan beberapa tokoh mengadakan webinar dengan tujuan sosialisasi permenas 16/2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, kemudian meningkatkan kepedulian masyarakat khususnya milenial terhadap lansia agar mereka bahagia, meningkatkan kepedulian dengan mengkon-solidasikan berbagai program menuju provinsi Jabar yang ramah lansia," paparnya.

Sementara menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, yang terpenting untuk para lansia harus ada kegiatan-kegiatan. Kedua, untuk Lansia yang terpenting adalah ada keluarga yang mem-

berikan perhatian, kasih sayang dan juga kepedulian.

Karena, kata dia, kalau perhatian untuk Lansia berasal dari luar anggota keluarga akan berbeda maka yang terpenting yang menangan Lansia kita harus berikan kesadaran pada keluarganya.

"Kenapa masuk panti, dititip ke yang lain atau titip yang lain. Maka peran kyai, orang intelek memberikan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan orang tua," katanya.

Di sisi lain, kata dia, Pemprov juga selalu memberikan pelayanan terbaik termasuk anggaran meski belum maksimal. "Perlu kami ingatkan, nilai ibadah bagi anak yang mengurus, memperhatikan orang tua," katanya.

Menurut Ketua Umum Lembaga Lansia Indonesia Jabar, Nu'man Abdul Hakim, lembaga lansia di Jabar didirikan sebagai mitra Pemprov Jabar. Saat ini, yang dibutuhkan Lansia adalah Rumah Sakit khusus untuk Lansia usia ke 60 tahun ke atas.

"Karena, penyakit Lansia ini khusus. Kalau ada RS untuk Lansia, Jabar akan jadi yang pertama mendirikan RS Lansia," katanya. ● **pur**



IDN/ANTARA

GERAKAN MENANAM Pohon KOPI DI BANDUNG

Dua orang warga menunjukkan bibit kopi arabika saat acara gerakan menanam pohon kopi di Pasirwangi, Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/4). Pada gerakan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menyediakan 3.000 bibit pohon kopi arabika untuk ditanam di kawasan hulu Kota Bandung sebagai upaya penghijauan serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui tanaman kopi.

Box Girder Kereta Cepat Dipasang, Hindari Ruas Jalan Ini

BANDUNG (IM)- Jasa Marga Metropolitan Tollroad (JMTI) akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional pada pintu keluar Tol Moh Toha, Bandung seiring rencana pemasangan box girder kereta cepat Jakarta-Bandung Pemasangan box girder dilakukan pada Kamis (29/4) pukul 23.00 Wib hingga Jumat (30/4) pukul 04.00 Wib.

Thomas Dwiatmanto, General Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad mengatakan, rekayasa lalu lintas secara situasional akan diberlakukan selama pemasangan box girder berlangsung. Rekayasa lalu lintas dilakukan selama 15-20 menit antara pukul 23.00 Wib hingga pukul 00.00 Wib.

Selanjutnya, antara pukul 01.00 Wib hingga pukul 02.00 Wib. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan pengguna jalan. "Jasa Marga akan memberlakukan

kan rekayasa lalu lintas secara situasional," ujarnya melalui keterangan pers yang diterima, Selasa (27/4).

Dia mengatakan, bagi kendaraan golongan 1 non bus dari arah Jakarta yang akan keluar di gerbang Tol Moh Toha. Toha diarahkan melewati lajur detour akses keluar Moh Toha. Sedangkan kendaraan non golongan 1 dan bus akan dialihkan keluar ke gerbang tol Buah Batu.

Pihaknya turut menyiapkan rambu-rambu pengamanan pekerjaan, memasang rambu pengalihan lalu lintas, memasang lampu selang, menyiapkan petugas pengaturan lalu lintas. Serta memastikan petugas tetap menjaga protokol kesehatan di lokasi pekerjaan. "Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan tersebut. Diimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati," katanya. ● **pur**

Pemprov Jabar Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 Jelang Lebaran

BANDUNG (IM)- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengantisipasi terjadi peningkatan kasus Covid-19 menjelang Lebaran. Dalam sepekan terakhir, Jabar dilaporkan provinsi dengan penambahan kasus tertinggi dengan penambahan lebih dari 1.000 orang, atau 1.456 orang. Hingga Senin (26/4) total kasus dari provinsi terpadat ini pun mencapai 273.135 kasus.

Menanggapi itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menuturkan saat ini Pemprov Jabar sedang memantau peningkatan kasus Covid-19 tersebut. "Kita sedang monitor apakah ada korelasi dengan hubungan curi-curi mudik atau tidak. Kalo iya, berarti menambah keyakinan bahwa mudik harus segera dibatasi. Termasuk sanksinya," kata Ridwan Kamil atau Emil di sela kunjungan ke Rumah Duka Letkol Irfan Suri, Bogor, Selasa (27/4).

Adapun beberapa upaya telah dilakukan sejak satu pekan

lalu dengan memutarbalikkan ribuan kendaraan di pintu-pintu masuk wilayah perbatasan seperti Bandung atau Bogor, dan penyekatan itu masih akan terus berlangsung hingga H+7 Lebaran atau 20 Mei 2021. "Kemudian instruksi di kampung-kampung bagi orang dekat mudik untuk dikarantina selama lima hari sudah dilakukan juga," paparnya.

Dia menjelaskan, mudik dilarang karena sifatnya berbarengan di satu waktu dan secara massal. Kerumunan seperti inilah yang sangat rentan dengan penularan Covid-19. Mudik lokal masih diperbolehkan di sejumlah kawasan saja, seperti di dalam Jabodetabek dan Bandung Raya. Hal ini disebabkan jaraknya dekat dan orang-orang di dalamnya lebih sering bertemu.

"Yang dihindari yang jarak jauh. Semua kebijakan pusat kita amankan, intinya kita satu frekuensi dengan pemerintah pusat," tambah Emil. ● **pur**